1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 2 3



Tanggal:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| Media Online | |
|--------------|------------|
| Media Cetak | Warta Kota |

Gratiskan Tarif Transjakarta

Postur APBD Dinilai Mampu Biayai

Duren Sawit, Warta Kota

Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mendorong Pemerintah DKI Jakarta agar menggratiskan tarif Transjakarta kepada para penumpang.

Selama ini para penumpang harus membayar tarif Rp 3.500 per orang jika ingin naik bus bus rapid transit (BRT) maupun non-BRT yang berada di jalur umum.

"Saya melihat kalau kemampuan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) DKI Jakarta bisa saja gratis, bahkan ke depan disertai dengan perbaikan kualitas," ujar Tigor saat diskusi bertajuk Tarif Bus Transjakarta Gratis, Emang Bisa? yang digelar Forum Jakarta Kita di Kopi Timur, Jalan Pondok Kelapa Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis (9/3/2023).

Tigor mengatakan, postur keuangan DKI Jakarta paling besar dibanding daerah lain di Indonesia, Pada tahun 2023 saja, alokasi APBD yang disahkan DPRD DKI Jakarta pada akhir 2022 lalu mencapai Rp 83,7 trilium.

Dengan alokasi sebesar itu, dana public service obligation (PSO) atau subsidi angkutan umum di Jakarta sekitar Rp 5 triliun untuk tiga jenis angkutan umum. Mulai dari Transjakarta. LRT Jakarta dan MRT Jakarta.

"Paling nanti cuma naikin beberapa PSO lagi, dan jumlah PSO juga cukup besar untuk Transjakarta paling tidak setiap tahun minimal Rp 3 triliun. Itu kan uang warga Jakarta dan harus dikembalikan kepada warga Jakarta dalam bentuk pelayanan publik," jelas Ketua

15 GOLONGAN PENERIMA KARTU LAYANAN GRATIS TRANSJAKARTA

- Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah
- Tenaga kontrak yang bekerja di Pemerintah Daerah
- 3. Peserta didik penerima KJP
- 4. Karyawan swasta tertentu
- Penghuni rumah susun sederhana sewa
- Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Penerima beras keluarga sejahtera yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek)

- Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
- Veteran Republik Indonesia
- 10. Penyandang disabilitas
- Penduduk lanjut usla
- Marbot (pengurus masjid)
- Pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 14. Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dan
- Tim Penggerak
 Pemberdayaan dan
 Kesejahteraan Keluarga.

Forum Warga Kota (Fakta) Jakarta ini.

Hal itu semua dikatakan Tigor untuk menanggapi usulan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Adi Kurnia Setiadi.

Anggota dewan dari Partai Gerindra itu menginginkan, Transjakarta digratiskan untuk masyarakat agar mereka mau beralih naik angkutan umum dari kendaraan pribadi.

"Saya sepakat dan kenapa tidak kalau Transjakarta itu digratiskan karena selama ini kita juga punya contoh misalnya bus sekolah yang gratis," imbuh mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) tersebut.

15 Golongan

Sementara itu sebanyak 15 golongan masyarakat di Jakarta bisa meniknati layanan Transjakarta secara gratis.

Kebijakan ini tercantum dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Pergub Nomor 160 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Transjakarta Gratis Dan Bus Gratis Bagi Masyarakat.

"Kalau bicara ini gratis atau tidak, sekarang sudah gratis naik Transjakarta, contohnya anggota TNI-Polri naik Transjakarta sudah gratis, PJLP (petugas jasa lainnya perorangan) juga gratis, termasuk orang-orang yang tinggal di rusum," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Adi Kurnia

"Masyarakat itu adalah orang yang tinggal di Jakarta dan ber-KTP Jakarta itu harus bisa merasakan manfaat uang APBD," tambahnya, (faf)